

Judul Rapat:**Rapat Pembahasan Pengusulan Jabatan Fungsional Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Modul dan Kurikulum Pariwisata Dasar**

Hari/ Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020

Waktu : 09.00 – 10.30

Tempat : WFH dan WFO

Media : Zoom Meeting

Agenda :

1. Pembukaan
2. Pembahasan Pengusulan Jabatan Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pembahasan Pengembangan Modul dan Kurikulum Pariwisata Dasar
4. Penutupan

Pemimpin Rapat:

Ni Wayan Giri Adnyani (Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama)

Peserta Rapat:

1. Anggara Hayun Anujuprana (Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
2. Haryadi Darmawan (Pembantu Ketua STP Bandung)
3. R. Adi Mukhtar Rivai (Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)
4. Eka Pan Lestari (Kepala Bidang Jabatan Fungsional)
5. Joko Abu Bakir (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan)
6. Ridha Sari Afriala (Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional)
7. Asri Christiyani (Kepala Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional)
8. Amalia Diani
9. Eliza Nur Fitriani
10. Rayinda Ajeng
11. Evinsa Injani
12. Ratih Dewanti
13. Grace Cornelia M
14. David Parluhutan

Total: 15 orang

Hasil Rapat:**Agenda 1:**

Pembukaan (Ibu Ni Wayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama)

Kegiatan Rapat dibuka oleh Ibu Ni Wayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. Beliau memberikan arahan kepada Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusbang SDM

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memulai laporan pembahasan pada rapat tersebut.

Agenda 2:

Pembahasan Pengusulan Jabatan Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bapak Anggara Hayun selaku Kepala Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Bapak Hayun menyampaikan mengenai nomenklatur jabatan fungsional Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah disetujui oleh Kemenpan-RB. Selain itu, mengenai unsur juga telah disetujui. Pusbang SDM Parekraf telah melaksanakan sampai kepada tahapan yang ketiga yaitu perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan. Pada proses pelaksanaan secara internal, Pusbang SDM Parekraf telah bekerja sama dengan Biro SDMO. Secara eksternal, Pusbang SDM Parekraf telah melaksanakan *benchmark* kepada instansi-instansi pemerintah lainnya seperti LAN, BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa.

Pusbang SDM Parekraf melalui Bidang Jabatan Fungsional juga telah melaksanakan workshop yang melibatkan beberapa pihak diantaranya dengan Asisten Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB, Biro SDMO, dan beberapa pihak lainnya.

Mengenai pengangkatan jabatan fungsional Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya adalah:

1. Proses Inpassing
2. Proses Pengangkatan Pertama
3. Proses Perpindahan
4. Proses Promosi

Selain itu, Pusbang SDM Parekraf juga akan melaksanakan Pembobotan Uji Beban Kerja dan Norma yang dibagi dalam beberapa tahapan diantaranya adalah:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan (memilih sampel dan melakukan uji beban kerja)
3. Pengolahan Data (menentukan *levelling*)

Menurut Ibu Sesmen, peserta pelaksanaan workshop untuk matriks pembobotan kegiatan diharapkan benar-benar terpilih dan bukan hanya

sekedar melakukan proses pengiriman dari unit kerja. Sebaiknya dipastikan dahulu pesertanya siapa, lalu workshop dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan Uji Beban Kerja dan Norma Waktu, Pusbang SDM Parekraf akan mengambil sampel pada Kemenparekraf/Baparekraf, daerah dengan beban kerja besar, daerah dengan beban kerja sedang dan daerah dengan beban kerja kecil. Pembagian daerah ini mempertimbangkan tipologi instansi menurut Peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016.

Arahan Ibu Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama

Membuat dalam bentuk matriks mengenai pengambilan sampel ke daerah-daerah tersebut. Sehubungan dengan wilayah Indonesia yang luas, penting apabila penentuan daerah mencerminkan keempat pilar yang ada pada Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan melihat juga dari sisi ekonomi kreatifnya. Selain itu, baik pula apabila tidak dalam kabupaten yang sama. Maka dengan itu, baik apabila dibuat dalam bentuk matriks dikarenakan dasar yang digunakan yaitu Peraturan Kementerian Pariwisata tersebut pada tahun 2016 sehingga dalam rentang waktu 4 tahun sudah banyak perubahan yang terjadi.

Agenda 3:

Pembahasan Pengembangan Modul dan Kurikulum Pariwisata Dasar (Bapak Haryadi Darmawan selaku Pembantu Ketua STP Bandung)

Kegiatan rapat dilanjutkan dengan pembahasan pengembangan modul dan kurikulum Pariwisata Dasar yang disampaikan oleh Bapak Haryadi. Beberapa hal yang disampaikan adalah:

1. Dasar Hukum dari Rancangan Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Dasar
2. Mengenai hal ini juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Kemenpan-RB No 38 Tahun 2017 Pasal 1, UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 7 dan Pasal 53
3. Berpacu dari Kemenristekdikti, disusunlah Alur Penyusunan Kurikulum Diklat yang merupakan Telaah Keilmuan dan Keahlian (*Travel, MICE, Hospitality dan Destination*) dengan Kajian Kebutuhan Masyarakat dan Stakeholders kemudian muncullah profil lulusan, capaian pembelajaran

dan pemilihan dan bobot bahan kajian. Dari sana akan muncul oembentukan mata kuliah, sks dan skripsinya serta penyusunan struktur kurikulum.

4. Menurut riset yang dimiliki oleh STP Bandung pada tahun 2020, setiap pelaku dari Kepariwisata dari segi pimpinan, penyedia dan staff masih dalam kategori rendah secara pemahaman kompetensi. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya diklat Pariwisata Dasar, kompetensi setiap aspek dapat meningkat.
5. Usulan level Diklat Teknis Kepariwisata dibagi menjadi 3 level diantaranya adalah level 5,6 dan 7 yaitu level 5 untuk tingkat dasar, level 6 untuk tingkat menengah dan level 7 untuk tingkat lanjutan.
6. Kebijakan yang ada didasarkan pada Permenpan-RB No 38 Tahun 2017 mengenai 5 level penguasaan kompetensi.
7. Skema yang diterapkan dalam proses ini adalah adanya input – proses – output yang artinya memperhatikan level kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari ASN Pusat dan Daerah. Sehingga perlu adanya sikap yang selektif dalam mengikuti diklat ini, dalam artian apabila sudah dinyatakan lulus dan berkompentensi di tingkat dasar, peserta baru dapat melangkah ke tingkat menengah dan seterusnya.
8. Struktur Jam Pelajaran (JP) memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 70 JP dengan standar pelaksanaan paling singkat 10 hari. Pembagian Jam Pelajaran dibagi menjadi:
 - a. Pretest dan Post-Test
 - b. Tatap Muka: 35-40 JP
 - c. Studi Lapangan: 24 JP
 - d. Diskusi dan Presentasi: 16 JP
 - e. Evaluasi
9. Terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan Diklat Dasar Kepariwisata yang dilaksanakan pada 2017 dan yang akan dilaksanakan pada 2020. Pada tahun 2020, pilar Diklat mengandung 5 hal diantaranya adalah: Konsep Dasar Kepariwisata, Pengetahuan Dasar Industri Kepariwisata, Pengetahuan Dasar Pemasaran Pariwisata, Pengetahuan Dasar Kelembagaan Pariwisata dan Pengetahuan Teknologi Informasi.

Arahan Ibu Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama

Pada prinsipnya, Ibu Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama setuju

dengan adanya Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Dasar ini. Kemudian apabila sudah oke, kapan pelaksanaannya dapat direncanakan. Selain itu, Diklat Kepariwisata Tingkat Dasar ini sepertinya dibutuhkan untuk di Dinas-Dinas Pariwisata juga kemudian dibutuhkan oleh pegawai di Kemenparekraf baik yang memiliki background Kepariwisata dan yang tidak memiliki background Kepariwisata dikarenakan para pegawai harus paham mengenai Pariwisata Dasar walaupun sebatas administrasi. Dalam kondisi seperti ini, perlu dipikirkan bagaimana pelaksanaannya, apakah di Bandung atau di Jakarta. Silahkan dibicarakan dengan para eselon II termasuk dengan STP Bandung. Mengenai Diklat Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjutan, mungkin dapat dibuat lebih spesifik mengenai modul dan kurikulumnya. Pembahasannya dapat mengundang unit kerja terkait dikarenakan dosen memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut dan unit kerja paham mengenai implementasi *governmentnya*. Sehingga diharapkan Diklat Kepariwisata ini akan sejalan dengan Jabatan Fungsional Adyatama.

Jawaban Bapak Anggara Hayun Anujuprana

Bapak Anggara Hayun pada kegiatan rapat ini akan menindaklanjuti sesuai arahan Ibu Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama serta Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Dasar ini juga akan dibuat dalam bentuk *online/e-learning*.

Kesimpulan Rapat:

Kesimpulan pada kegiatan Rapat Pembahasan Pengusulan Jabatan Fungsional Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Modul dan Kurikulum Pariwisata Dasar, yaitu:

- a. Bidang Jabatan Fungsional akan mulai memetakan daerah-daerah di Indonesia yang menjadi sampel untuk pelaksanaan uji beban dan norma waktu guna pembentukan Jabatan Fungsional Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan akan mulai mempersiapkan pelaksanaan Diklat Kepariwisata Tingkat Dasar serta metode pembelajaran yang akan diberlakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang berlangsung saat ini

Catatan/Tindak Lanjut:

- a. Pembuatan matriks untuk daerah-daerah yang menjadi sampel Pelaksanaan Uji Beban dan Norma Waktu
- b. Persetujuan untuk pelaksanaan Diklat Kepariwisataan Tingkat Dasar bagi para pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dan sistem pelaksanaannya.

DOKUMENTASI:

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a document titled "MATERI DIKLAT TEKNIS" is shared. The document contains a table with the following content:

No	PILAR	Materi DIKLAT	Peserta Matriks	SP
1	KONSEP DASAR KEWISATAAN	1. Definisi dan Konsep Dasar Pariwisata 2. Sejarah Pariwisata 3. Ruang Lingkup Pariwisata 4. Prinsip-prinsip, Etika, Perilaku dan Kepatuhan 5. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pariwisata	1. Haryadi STP Bandung 2. Amalia-PPSDM Pare...	3
2	PEMBAHASAN KEWISATAAN NASIONAL	1. Perkembangan pariwisata Indonesia 2. Konsep, Fungsi, Tujuan dan Manfaat Pariwisata 3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata 4. Peran, Misi dan Program kegiatan pariwisata	1. Haryadi STP Bandung 2. Amalia-PPSDM Pare...	3
3	DASAR KONSEP KEWISATAAN	1. Misi dan Visi Pariwisata 2. Konsep dan Definisi Pariwisata 3. Ruang Lingkup dan Manfaat Pariwisata 4. Prinsip-prinsip, Etika, Perilaku dan Kepatuhan 5. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pariwisata	1. Haryadi STP Bandung 2. Amalia-PPSDM Pare...	4

The Zoom grid includes participants: Haryadi STP Bandung, Amalia-PPSDM Pare..., Hayun, Ratih Dewanti, Grace Cornelia, Adi Mukhtar, Eliza Nurfitriana, Rayinda Ajeng, Giri Adnyani, Eka Silaban, Asri Christiyani, TU Sesmen/Ses..., VINS A, Ridha Sari, Heri Hermawan, Pusbang SDM P..., Benita Situmora..., Joko A.B - Pusb..., and suwanto.

This screenshot shows the same Zoom meeting from a different perspective. The shared document is no longer visible. The participants in the grid are: Haryadi STP Bandung, Amalia-PPSDM Pare..., Hayun, Giri Adnyani, Ratih Dewanti, Grace Cornelia, Adi Mukhtar, Rayinda Ajeng, Eka Silaban, Asri Christiyani, TU Sesmen/Ses..., Eliza Nurfitriana, VINS A, Ridha Sari, Heri Hermawan, Pusbang SDM Parekraf, Benita Situmorang, Joko A.B - Pusbang S..., and suwanto.

Notulis

Amalia Diani

Grace Cornelia